

MUADALAH

JURNAL HUKUM

Volume 2 No. 1 Mei 2022

REKONSTRUKSI FIKHI LINGKUNGAN TERHADAP KEADILAN LINGKUNGAN

Sudirman, Marilang, Ismail Suardi Wekke

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEREMPUAN SUKU ASLI PAPUA DI KOTA SORONG

Hujrman, Magfirah Takina

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI LAPAS KELAS II B SORONG

Neneng Anjarwati, Mohammad Arafah Idrus

PANDANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Restu Widyastuti

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SORONG

Udin Latif, Aas Tri Ariska

STRATEGI KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF KEPALA CABANG BANK MUAMALAT SORONG DALAM MEWUJUDKAN BUDAYA RELIGIUS

Eko Irianto

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
PEREMPUAN SUKU ASLI PAPUA DI KOTA SORONG**

Hujrman

Institut Agama Islam Negeri Sorong

Hujrman@gmail.com

Magfirah Takina

magfhiratakina@gmail.com

Abstract

Nowadays, the existence of women should not be underestimated because their presence in various fields ranging from political, economical, and social sectors shows that they play an important role in the development of a country. However, many women still experience discrimination and are seen as subordinate to men. It is an obstacle for women to empower themselves. In Sorong, the local culture tends to prioritize men. In the traditional Papuan marriage culture, a man pays a certain nominal when proposing a woman, making him think he has bought the Papuan woman so that he has the right to act arbitrarily and even resort to violence. This study aims to investigate the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in improving the quality of indigenous Papuan women and the inhibiting and supporting factors in carrying out its role. The research used a descriptive qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation.

The findings show that the roles of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in improving the quality of Papuan women are divided into two stages: skill training and motivation (through socialization). The inhibiting factors include, first, the budget is often disbursed too late, so it slows down every program that has been designed, and second, societies' participation. The supporting factors were, first, the government policy, and second, the budget.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Perempuan Papua, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong.

Pendahuluan

Diskriminasi yang sering dialami kaum perempuan serta stigma bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki menjadi salah satu penghambat pengembangan diri perempuan. Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam pemberdayaan perempuan sebagai bentuk kesetaraan gender. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹ Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, baik terhadap wanita maupun pria. Oleh karena itu, setiap warga Negara mempunyai hak yang sama tanpa memandang agama, suku, golongan, jenis kelamin, dan kedudukan.

Namun pada kenyataannya, kondisi di masyarakat masih menganggap perempuan hanya mampu bergerak pada lingkungan domestik. Seperti halnya di kota Sorong yang ditempati oleh berbagai macam suku. Sebagian budaya masyarakat yang berada di Kota Sorong selalu mengutamakan lelaki bekerja dan mencari nafkah sehingga kaum perempuan dianggap tidak mempunyai potensi untuk bisa membantu keluarga dalam ekonomi. Sebelum adanya modernisasi atau perubahan pola pikir perempuan Papua dalam meningkatkan kualitas dirinya, sebagian perempuan suku asli Papua sangat minim untuk meningkatkan kualitas atau potensi yang dimiliki karena dipandang sebelah mata oleh laki-laki atau suami mereka, hal tersebut menjadi kelemahan dan mengakibatkan laki-laki melakukan apapun dengan sesuka hatinya.²

Contohnya pada suku Maybrat, ketika hendak menikahi perempuan Maybrat harus memenuhi syarat mahar berupa kain timor, apabila tidak memiliki kain timor maka boleh membayar uang tunai sesuai permintaan keluarga perempuan, karena kain timor tidak dimiliki oleh semua orang dan harganya berkisar dari puluhan hingga ratusan juta, semakin tua umur kain timor maka semakin tinggi uang yang harus dibayar. Oleh karena itu, sebagian lelaki menganggap setelah menikahi perempuan maybrat sama hal

¹ Pasal 27 ayat (1) *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

²Februhan Rumahlatu (52), ‘Wawancara’, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (Sorong, Papua Barat: 01 Juli 2021,).

nya dengan membeli perempuan tersebut sehingga bisa melakukan apapun dengan sesuka hatinya.³

Menurut Pdt. Debora I Mambrasar, bahwasanya sebagian perempuan suku asli Papua bekerja di kebun mulai dari menanam, memanen, mengolah sampai memasarkan hasil kebunnya di pasar. Kemudian sebagian laki-laki hanya tinggal di rumah dan tidak memiliki potensi untuk bekerja karena sebagian laki-laki menganggap telah memberikan mas kawin sangat mahal kepada perempuan sehingga menganggap bahwa ia tidak wajib untuk bekerja.⁴

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah melakukan perlindungan dalam rumah tangga dan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan berkembangnya zaman, budaya yang selalu menganggap bahwa kaum perempuan tidak mampu bersaing dengan laki-laki, tidak relevan di zaman sekarang, sebab zaman sekarang lebih menuntut seseorang mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama bukan berdasarkan jenis kelamin. Dengan adanya modernisasi, maka pemikiran tersebut juga mulai berubah, perempuan mampu mendapat pengakuan yang sama dengan laki-laki, perempuan mampu menambah penghasilan finansial keluarga. Oleh karena itu, sebagian perempuan asli Papua telah mengubah pola pikir dengan ingin mensejahterakan kehidupannya dengan meningkatkan kualitas yang mereka miliki. Namun masih ada sebagian perempuan suku asli Papua yang belum bisa meningkatkan kualitas diri sehingga dibutuhkan peran Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Sorong diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sorong dan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sorong Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi

³ Hendrina Johanna Sylvi Wasuway, *Perempuan Maybrat Dan Dominasi Patriarki*, Tesis, 2012.h.3.

⁴ Fachri Djaman, 'Gandeng Unhas, Dinas P3A Kota Sorong Gelar Diskusi Pemberdayaan Perempuan', *Makassar Terkini.Id*, 2019 <<https://makassar.terkini.id/gandeng-unhas-dinas-p3a-kota-sorong-gelar-diskusi-pemberdayaan-perempuan/>> Diakses 20 March 2020.

Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sorong. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji tentang bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kualitas perempuan suku asli Papua di Kota Sorong dan apa penghambat dan pendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kualitas perempuan suku asli Papua di Kota Sorong

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang berfokus dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Sorong sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan, baik melalui observasi, wawancara.⁵

Lokasi penelitian ini di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Malabutor, kecamatan Sorong, Kota Sorong. Sumber data yang dilakukan penelitian ini adalah data hasil penelitian yang didapatkan melalui dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen grafis seperti catatan, notulen, hasil rapat, foto, nilai, rekaman video. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁶

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meningkatkan Kualitas Perempuan Suku Asli Papua di Kota Sorong

⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, ke 3 (Jakarta: Kencana, 2020),h.149.

⁶ Imam Suyitno, *Karya Tulis Ilmiah (Panduan, Teori, Pelatihan, Dan Contoh*, ed. by Ali S Mifka, ketiga (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), h. 158

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya untuk mencegah terjadinya diskriminasi berupa kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu masalah yang sering terjadi, sehingga perempuan bisa melindungi hak dan memberdayakan dirinya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Februhans Rumahlatu, menyatakan:

“Tiap tahun selalu ada laporan yang masuk mengenai kekerasan dalam rumah tangga, faktor yang sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan karena masalah ekonomi, dan miras (minuman keras), di tahun 2020 sudah ada 5 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di kantor dinas ini tapi kebanyakan masyarakat langsung melapor ke kepolisian karena dinas ini hanya sebatas mediasi dan pendampingan tidak masuk ke ranah pengadilan. Kemudian dinas ini memiliki mitra kerja yaitu kantor polisi, rumah sakit, tokoh agama, dan tokoh adat”⁷

Kekerasan dalam rumah tangga tiap tahunnya selalu ada, faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi karna masalah finansial atau perekonomian yang berakhir pada pertingkaian yang merugikan pihak wanita dan berdampak buruk terhadap anak, terlebih adanya kebiasaan sebagian masyarakat papua yaitu meminum minuman keras yang menjadi salah satu hal yang mengacu pada kekerasan. Namun sejauh ini Pemerintah Daerah melalui DPPPA hanya memiliki wewenang sebatas mediasi dan pendampingan tidak sampai ke ranah pengadilan, sehingga masyarakat lebih melapor kasus kekerasan dalam rumah tangga langsung pada kepolisian. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan mediasi guna membuat perdamaian antar kedua pihak yang bertengkar di luar pengadilan agar tercapai suatu kesepakatan perdamaian, serta dalam berlangsungnya mediasi, mediator menjelaskan kepada kedua belah pihak mengenai sanksi-sanksi apa saja yang dijatuhkan serta denda yang akan di kenai, lalu menyampaikannya sesuai dengan undang-undang mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta pemahaman mengenai proses-proses yang terjadi apabila telah masuk diranah pengadilan. Februhans Rumahlatu, menyatakan:

⁷ Februhans Rumahlatu (52), ‘Wawancara’, Selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (Sorong, 01-Juli- 2021, Pukul 12:31).

“ Di Papua ini kan ada namanya nikah adat, ibaratnya perempuan dibeli harta jadi kalau perempuan dibeli maka laki-laki bisa semenah-menah melakukan apasaja karena prinsipnya mereka sudah membeli dengan uang, sehingga perempuan Papua disepelihkan kadang tidak dikasi uang belanja dan sampai terjadi kekerasan dalam keluarga biasa faktor utamanya ekonomi, sehingga dinas ini berupaya meningkatkan ekonomi keluarga, dengan kembangkan perempuan papua punya potensi dengan melakukan pelatihan dengan kerja sama dengan sanggar maupun organisasi perempuan yang ada Kota Sorong”⁸

Kekerasan terjadi pada perempuan suku asli Papua di Kota Sorong karena adanya prinsip laki-laki yang beranggapan bahwa telah membeli perempuan, jadi mereka punya hak untuk melakukan apapun dengan sesuka hati. Pemerintah Kota Sorong melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah hal tersebut melakukan pemberdayaan khususnya perempuan suku asli Papua dengan melakukan program-program pelatihan untuk menggali potensi yang mereka miliki. Februhans Rumahlatu, menyatakan:

“Pemberdayaan perempuan kepada perempuan yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sorong sangat membantu perempuan dalam memperbaiki kondisi hidup mereka saat ini untuk mendapatkan kesejahteraan dalam keluarga”⁹

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sorong ini memiliki upaya untuk memberdayakan perempuan agar mendapatkan mutu hidup yang lebih baik dan bisa mengembangkan potensi yang mereka punya, sehingga mereka bisa menciptakan masa depan yang lebih baik dan membentuk kesejahteraan dalam keluarga. Untuk itu, dalam meningkatkan kualitas perempuan suku asli Papua di Kota Sorong, DP3A memiliki tugas atau fungsi salah satunya ialah melaksanakan pelayanan

⁸ Februhans Rumahlatu (52), ‘Wawancara’, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (Sorong, 01- Juli-2021, Pukul 12:31).

⁹ Februhans Rumahlatu (52), ‘Wawancara’, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (Sorong, 01- Juli-2021, Pukul 12:31).

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan meningkatkan kualitas hidup perempuan Papua melalui pelatihan tentang manajemen produksi, manajemen pemasaran dan manajemen wirausaha.¹⁰ Yakomina Isir, menyatakan:

“Perempuan khususnya suku asli Papua harus bisa mengubah pola pemikirannya yaitu meninggalkan pola pikir yang berpandangan bahwa laki-laki harus selalu diatas sedangkan perempuan selalu dibawah, pola pemikiran tersebut, harus diubah agar perempuan bisa berfikir bahwa kesetaraan gender berarti kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam mengambil keputusan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya pada jenis kelamin, bukan pengambilan keputusan dalam kebersamaan maupun dalam organisasi”¹¹

Perempuan suku asli Papua diharapkan dapat meningkatkan pola pikir-nya sehingga mampu merubah kehidupannya yang tidak selalu di pandang rendah di bandingkan laki-laki, karena perempuan memiliki potensi yang sama dalam meningkatkan kualitas perekonomian maupun pengambilan keputusan.

“Di bidang ini telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan yang telah di berikan melalui Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sorong Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sorong”¹²

Dari pernyataan tersebut, maka untuk tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan suku asli Papua sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sorong Perubahan Atas

¹⁰ Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sorong, *Laporan Kinerja Pegawai (LAKIP) DPP & PA Kota Sorong* (Sorong, 2020).

¹¹ Metro, ‘Pola Pikir Perempuan Harus Berubah’, *Radar Sorong*, 2021, diakses pada hari Kamis, 12- Agustus-2021, pukul 22:00 <<https://www.radarsorongnews.com/pola-pikir-perempuan-papua-harus-berubah/>>.

¹² Dorkas Ijie (44), ‘Wawancara’, Staff di Bidang Kesetaraan Gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tanggal 02-Agustus-2021 Pukul 11:15.

Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sorong yaitu menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan Papua melalui pelatihan tentang manajemen produksi, manajemen pemasaran dan manajemen wirausaha. Kemudian setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berasal dari dana otonomi khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak memiliki mitra kerja atau bekerja sama dengan beberapa organisasi atau forum perempuan yang berada di Kota Sorong seperti Lembaga Adat Perempuan Papua (LAPEPA), Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI), Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Sanggar Maytemorai. Meningkatkan kualitas perempuan suku asli Papua di Kota Sorong, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan tugas dan fungsi dengan beberapa tahap yaitu:

a. Pelatihan atau Keterampilan

Pelatihan yang di berikan merupakan salah satu hal yang penting dan dianggap berhasil dalam kegiatan program pemberdayaan perempuan, pelatihan ini memberikan dampak yang positif kepada masyarakat khususnya perempuan sebab dari hasil pelatihan ini mereka bisa menerapkannya di dalam rumah tangga dan juga di terapkan dalam kehidupan sendiri, sehingga bisa memunculkan keterampilan yang baru untuk bisa mendukung dan menunjang kehidupan. Pelatihan yang diberikan untuk perempuan suku asli Papua, salah satu tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, guna mendukung pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi yang dikembangkan dalam program meningkatkan peran serta dalam kesetaraan gender, pembangunan, dan kegiatan dalam melaksanakan pelatihan keterampilan produksi dan manajemen wirausaha lokal untuk memperbaiki kualitas perempuan di bidang ekonomi. Dinas ini bekerja sama dengan Sanggar Maytemorai yang berada di Jln. Gunung Merapi No.48, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Kota, yang merupakan perempuan suku asli Papua dari berbagai suku yaitu Moi, Ayamaru, Kokoda, dan Maybrat. Dengan itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih mudah menjalankan program pelatihan guna meningkatkan kualitas perempuan suku asli Papua di Kota Sorong. Berikut program pelatihan yang telah dilaksanakan:

1) Pelatihan Pembuatan Tas Noken

Pelatihan Pembuatan Tas Noken ini telah dilakukan 2 kali yaitu pada tahun 2019 dan 2020. Pada pelatihan pertama dan kedua dilakukan di aula Sanggar Maytemorai.

“Pada pelatihan anyaman tas noken di hadiri sekitar hampir 90 orang mama-mama papua yang rata-rata berumur diatas 18-30 tahun. Kemudian pada pelatihan kedua dilakukan pada masa pandemi sehingga peserta yang mengikuti pelatihan ini di batasi kurang lebih 40 orang dengan menggunakan protokol kesehatan. Namun tidak memungkiri respon dari peserta pelatihan pun sangat antusias dan senang.”¹³

Dengan respon mama-mama yang sangat antusias maka terdapat sikap penyadaran diri mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian tujuan dinas ini membuat pelatihan anyaman noken karena menganggap tas noken sebagai budaya dan tradisi orang asli Papua dan telah digunakan sejak dulu. Noken memiliki nilai yang luar biasa bagi orang Papua yang di dalamnya termasuk budaya, identitas dan jati diri orang Papua, dan meningkatkan pendapatan mama-mama Papua sehingga berpotensi menjadikan masyarakat atau keluarga yang sejahtera.

“Dari pelatihan anyaman noken yang diselenggarakan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sangat membantu menggali potensi saya dalam hal membuat noken, selain itu saya bisa berjualan dengan hasil dari membuat noken, biasa ada yang memesan dengan harga kisaran 50-100 ribu per noken”¹⁴

Dapat di ketahui bahwa dengan adanya pelatihan anyaman noken, dapat menambah keterampilan-nya yang awalnya tidak begitu tau cara pembuatan noken hingga bisa menghasilkan banyak orderan tas noken dan membantu pendapatan-nya dalam perekonomian keluarga.

Dari hasil wawancara dengan mama Margaretta juga merasa dengan adanya pelatihan ini membantu dalam hal menggali potensi hingga bisa

¹³ Ida (34), (honorir di bidang kesetaraan gender), ‘Wawancara’, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sorong, 2021), Tanggal 02- Agustus-2021 Pukul 10:45.

¹⁴ Elsa Mututi (23), Suku Ayammaru, ‘Wawancara’ (Kota Sorong, 2021), Tanggal 11- Agustus-2021, pukul 16:30.

mandiri untuk membuka usaha, serta membantu perekonomian dalam keluarga sehingga tercapai kesejahteraan dalam kehidupannya.

“Dari pelatihan tersebut, saya banyak belajar tentang dasar-dasar pembuatan noken setelah itu saya ikut-ikut belajar di orang kompleks sampai saya bisa menghasilkan uang untuk tambah-tambah belanja keperluan rumah tangga, biasa ada yang datang pesan noken sesuai dengan model yang mereka bawa, saya jual dengan harga paling murah 50-250 ribu”¹⁵

Dengan adanya pelatihan tersebut Marwah bisa membantu perekonomian keluarganya walaupun hanya berada di rumah sebagai ibu rumah tangga. Kemudian peneliti bertemu sekelompok mama-mama di Kompleks Kokoda dan rata-rata mereka banyak yang tau membuat noken karena Marwah mengajarkan mereka cara membuat noken dari dasar, hingga sebagian dari mereka menjual dan menghasilkan uang apalagi dimasa pandemi seperti ini sangat membantu mereka dalam hal ekonomi keluarga.

2) Pelatihan Kuliner Khas Papua (Es krim dengan bahan dasar sagu)

Pelatihan pembuatan es krim dilakukan pada tanggal 23 Desember 2020, di Sanggar Maytemorai. Es krim papeda merupakan penemuan baru yang dibuat dari bahan dasar sagu yang dikembangkan dari kreativitas mama-mama papua dalam mengelola bahan lokal menjadi jajanan sehat bagi keluarga. Dalam pelatihan ini kurang lebih sekitar hampir 50 peserta perempuan Papua, yang mana responnya sangat antusias dan senang, dengan adanya pelatihan ini mengajarkan ke masyarakat bahwa sagu dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan sehat bagi keluarga dan memiliki nilai ekonomi. Yakomina Isir selaku Kepala Bidang Kesetaraan Gender melalui Kompas Tv:

“Pelatihan ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan Papua sekaligus memperkenalkan es krim dengan bahan lokal yaitu sagu”¹⁶

¹⁵ Marwah Agia (25), ‘Wawancara’ (Suku Kokoda, Kota Sorong,), 12-Agustus-2021, Pukul 11:18.

¹⁶ Kompas Tv Sorong, ‘Sanggar Maitemorai Pelatihan Kuliner Khas Papua’, *Kompas Tv*, 2020 , diakses pada hari Kamis, tanggal 12-Agustus-2021, pukul 19:30

Sehingga dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, diharapkan dapat meningkatkan potensi perempuan Papua dalam memanfaatkan pangan lokal yang memiliki nilai jual guna membantu pemulihan ekonomi keluarga.

3) Pelatihan Pembuatan Kerupuk Kembang Sagu

Pelatihan krupuk kembang sagu telah dilakukan dua kali yaitu pada tahun 2018 dan 26 November 2020, di Sanggar Maytemorai.

“Kerupuk sagu ini merupakan penemuan baru karena dibuat dari bahan dasar sagu bukan dari tepung sagu tapioka, jadi untuk menambah pengetahuan ke masyarakat bahwa sagu bukan hanya dibuat sebagai papeda atau sagu lembeng tapi bisa juga di olah menjadi kerupuk sagu dan respon mama-mama Papua juga sangat gembira dan antusias”¹⁷

Dengan adanya penemuan baru ini merupakan bukti kreatifitas mama-mama Papua dengan mengangkat potensi makanan dengan bahan lokal berupa sagu, serta antusias perempuan-perempuan Papua yang kurang lebih sekitaran 70 orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Yakomina Isir selaku Kepala Bidang Kesetaraan Gender:

“Jadi kita giring datang untuk belajar dan nanti yang punya bakat akan dikembangkan serta dari kegiatan pelatihan pembuatan krupuk kembang sagu yang pertama dan kedua banyak yang telah di produksi dan di jual di kios-kios”.¹⁸

Oleh karena itu, dengan adanya pelatihan yang di selenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, diharapkan mama-mama Papua dapat meningkatkan potensi untuk dikembangkan dan memiliki nilai jual agar bisa membantu perekonomian keluarga di masa pandemi saat ini.

<<https://www.kompas.tv/article/132767/sanggar-maitemorai-pelatihan-kuliner-khas-papua>>.

¹⁷ Ida (34), Honorer Di Bidang Kesetaraan Gender, ‘Wawancara’ , Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sorong, 2021), Tanggal 02- Agustus-2021, Pukul 10:45.

¹⁸ Kompas Tv Sorong, ‘Isi Waktu Luang Warga Buat Sagu Jadi Kerupuk’, *Kompas Tv*, 2020, diakses hari Kamis, tanggal 12-Agustus-2021, pukul 19:44 <<https://www.kompas.tv/article/126496/isi-waktu-luang-warga-buat-sagu-jadi-kerupuk>>.

4) Pelatihan Kepemimpinan

Pelatihan kepemimpinan terhadap perempuan Papua tiap tahun diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan bekerja sama dengan sanggar Maytemorai. Yakomina Isir selaku Kepala Bidang Kesetaraan Gender melalui Kompas Tv:

“Perempuan Papua diberi pelatihan ini agar paham bahwa kesetaraan gender ialah kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan perbedaan laki-laki dan perempuan hanya pada jenis kelamin”¹⁹

Tujuan dilakukan pelatihan ini untuk dapat mengembangkan kemampuan perempuan Papua sehingga bisa terlibat dalam segala bidang, serta memotivasi perempuan Papua untuk mengubah pola pikir bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan sama dan dapat bersaing dalam berbagai bidang. Untuk perempuan Papua puji tuhan sudah diberikan hak untuk duduk di kursi legislatif seperti ibu Patronella kambuaya dan ada juga di kepolisian”²⁰

Pemerintah Kota Sorong telah memberikan peluang kepada perempuan Papua untuk bisa berpartisipasi di dalam bidang legislatif, oleh karena itu pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bisa menjadi kegiatan positif terhadap perempuan Papua untuk melatih diri sendiri agar bisa menjadi pemimpin didalam kehidupan.

b. Pemberian Motivasi

Pemberian motivasi adalah energi aktif yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan pada diri seseorang yang nampak pada gejala kejiwaan, perasaan, dan juga emosi, sehingga mendorong individu untuk bertindak atau melakukan sesuatu dikarenakan adanya tujuan, kebutuhan, atau keinginan yang harus terpenuhi.²¹ Pemberian motivasi yang

¹⁹ Kompas tv Sorong, ‘Bentuk Pola Pikir Perempuan Pelatihan Kepemimpinan’, 30 Desember 2020 <<https://www.kompas.tv/article/134226/bentuk-pola-pikir-perempuan-pelatihan-kepemimpinan>>, diakses tanggal 10-Agustus-2021 pukul 4:26.

²⁰ Ida (34), Honorer Di Bidang Kesetaraan Gender, ‘Wawancara’, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sorong, 2021), Tanggal 02- Agustus-2021, Pukul 10:45.

²¹ Yermia Marthin Kambuaya, ‘Pemberdayaan Perempuan Untuk Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat’, Skripsi, (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021), h.70.

dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat melakukan pelatihan dan juga sosialisasi kepada masyarakat khususnya perempuan agar mereka bisa mampu memahami akan diri mereka sendiri supaya bisa terlepas dari tindak kekerasan dan agar mereka tau bahwa memiliki potensi yang sama dengan laki-laki.

Sosialisasi yang dilakukan tentang pemberdayaan perempuan merupakan kegiatan awal dari serangkaian proses dalam meningkatkan kualitas perempuan suku asli Papua, berupa motivasi untuk menggerakkan pola pikir seseorang agar secara sadar timbul keinginan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sosialisai dengan cara berkunjung disetiap kelurahan. Berikut beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan kualitas perempuan suku asli Papua:

1) Seminar *The Power of Woman*: Perempuan Cerdas, Perempuan Berdaya, dan Perempuan Bahagia

Seminar *The Power of Woman*: Perempuan Cerdas, Perempuan Berdaya, Perempuan Bahagia dilaksanakan di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong dengan jumlah peserta 100 orang, terdiri dari 50 orang siswa SMA dan 50 orang ibu rumah tangga. Tujuan melakukan seminar ini ialah memotivasi bahwa kecerdasan perempuan sangat diperlukan agar bisa mengambil peran untuk keberlangsungan kehidupannya dengan mandiri, hingga akan membawa perubahan besar dalam pembangunan bangsa, dan perempuan harus menyadari potensi serta peluang-peluang yang ada dalam dirinya, dengan begitu perempuan yang cerdas, berdaya akan merasakan kebahagiaan hingga akan menjadi lebih produktif dan bisa berkontribusi dalam banyak hal saat sudah menyadari potensi yang dimiliki.

2) Sosialisasi: Kesetaraan Gender di Tengah Keluarga

Sosialisasi mengenai kesetaraan gender di tengah keluarga dilaksanakan di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong, dengan jumlah peserta sekitaran hampir 100 orang perempuan Papua dari berbagai profesi dari ibu rumah tangga, pedagang, maupun guru. Dengan tujuan dilakukannya sosialisasi agar memotivasi mama-mama Papua akan kesadaran diri bahwa seorang perempuan bekerja tidak hanya di dapur, di tempat tidur, dan di kamar mandi, namun

perempuan berhak mengekspresikan keinginannya lewat bekerja di luar rumah. Petrus Ribo selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak:

“Motivasi-motivasi yang diberikan oleh kami ini juga sudah Sebagian membawakan hasil dimana perempuan-perempuan yang mendengarkan motivasi yang diberikan oleh kami ini langsung mau melakukan hal-hal yang positif yang membawakan hasil dan keuntungan bagi diri mereka sendiri dan juga keluarga, selain itu pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh kami juga diikuti dengan baik karena Sebagian perempuan yang ingin benar-benar mengubah kondisi hidupnya dan ingin menciptakan masa depan yang lebih baik dan sejahtera”.²²

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh dinas dengan memberikan pelatihan dan juga sosialisasi diantaranya yaitu pemberian motivasi ini membawa dampak yang baik kepada perempuan Papua yang ingin mengikuti program tersebut perempuan diberdayakan karena adanya diskriminasi, kekerasan, serta masalah sosial lainnya seperti yang kemudian dilakukan penanggulangan masalah tersebut dengan mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menanggulangi pengurangan permasalahan sosial.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan peran nya dengan baik, walau memang hasil yang dicapai belum maksimal. Karena masih banyak warga yang belum sadar akan pentingnya hak-hak perempuan baik berupa perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan peningkatan terhadap kualitas atau potensi yang dimiliki, serta belum mengenal dan mengetahui fungsi dari dinas tersebut. Sehingga penulis rasa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih kurang, dan perlu diperbanyak lagi agar semakin banyak masyarakat terkhususnya perempuan asli Papua jadi paham dan mengerti.

²² Petrus Ribo (53), ‘Wawancara’, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kamis 1-Juli-2021, Pukul 11:40 WIT.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meningkatkan Kualitas Perempuan Suku Asli Papua Di Kota Sorong

Meningkatkan kualitas perempuan suku asli Papua, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota sorong tidak dapat terlepas dari adanya faktor pendukung maupun faktor penghambat, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

Berikut beberapa hal yang dapat membantu berjalannya pelaksanaan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Sorong dalam meningkatkan perempuan suku asli Papua, yaitu:

1) Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tidak lain untuk membantu masyarakat terutama masyarakat Papua dalam meningkatkan potensi yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan selalu berpedoman pada perundang-undangan.

“Kemarin kita masyarakat kokoda di panggil ke kantor atas (kantor walikota) untuk ikut rapat rencana membuat pasar noken, yang rencananya kami ini disuruh untuk membuat noken lalu di jual kemudian di jadikan pasar noken khas Papua”²³

Dapat dilihat dari pernyataan tersebut bahwa Pemerintah mendukung potensi masyarakat Papua dalam hal meningkatkan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan walaupun belum terealisasi.

2) Anggaran

Salah satu faktor pendukung dalam keberlangsungan kegiatan atau program dengan tujuan meningkatkan kualitas perempuan suku asli Papua adalah anggaran dana. Pada setiap kegiatan atau pelatihan yang dilaksanakan menggunakan anggaran otonomi khusus (OTSUS).

²³ Marwah Agia (25), (Suku Kokoda) ‘Wawancara’, Kota Sorong, 12-Agustus-2021, Pukul 11:18.

“Disini dek faktor pendukung salah satunya adalah anggaran, kalau anggaran turun cepat maka kegiatan dalam hal meningkatkan kualitas perempuan pun segera dilaksanakan”²⁴

Oleh karena itu, dengan adanya anggaran maka kegiatan yang dijalankan maupun direncanakan akan terlaksana dengan semestinya.

b. Faktor Penghambat

1) Anggaran

Setiap kegiatan yang di jalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus menggunakan anggaran.

“Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas perempuan suku asli papua ialah anggaran karena di dinas ini anggaran yang diberikan berasal dari dana Otsus yang mana tiap tahunnya jumlah yang diberikan selalu berbeda, dan cuman ada satu pos saja jadi setiap program yang di jalankan tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dan terkadang juga anggaran nya terlambat turun sehingga memperlambat program yang direncanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”²⁵

Oleh karena itu, Selain anggaran sebagai pendukung berjalannya kegiatan dalam meningkatkan kualitas perempuan suku asli Papua, tetapi juga bisa menjadi penghambat karena terkadang anggaran yang turun sering terlambat sehingga memperlambat kinerja yang telah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian jumlah anggaran yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk setiap program yang ingin direalisasikan berbeda. Apabila anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup maka program yang ingin direalisasikan tidak dapat berjalan seperti yang diinginkan bahkan tidak dapat terlaksana sama sekali.

2) Partisipasi Masyarakat

²⁴ Ida (34), (honorir di bidang kesetaraan gender), ‘Wawancara’ , Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sorong, 2021), Tanggal 02- Agustus-2021, Pukul 10:45

²⁵ Dorkas Ijie (51), ‘Wawancara’, Staff di Bidang Kesetaraan Gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tanggal 02-Agustus-2021 Pukul 11:15..

Faktor penghambat lainnya ialah kurangnya partisipasi masyarakat khususnya perempuan asli Papua.

“Dinas ini memiliki satu atau dua orang yang dengan suka rela membantu melaporkan apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan mempermudah dinas untuk mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah kegiatan rutin”²⁶

Salah satu upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ialah melakukan sosialisasi ke setiap Kepala Suku atau Kelurahan yang berada di daerah Kota Sorong dilakukan secara rutin tiap dua bulan sekali, dan mengevaluasi dengan mengadakan pertemuan relawan yang berada di tiap kelurahan, tokoh adat serta tokoh agama setiap bulan di aula Kantor Dinas, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya meningkatkan kualitas perempuan dari aspek ekonomi, sosial, hukum maupun politik dan mengantisipasi adanya kekerasan yang terjadi dilingkungan keluarga serta mengajak untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun pada kenyataannya apabila ada sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat, masyarakat tersebut kurang aktif bahkan ada yang tidak mau diajak untuk bersosialisasi dengan alasan mereka sedang bekerja, mengurus anak, ataupun sedang sibuk dan berbagai alasan lainnya, itu artinya perempuan khususnya perempuan asli Papua belum membuka diri secara penuh terhadap kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam Pemberdayaan Perempuan.

Kesimpulan

1. Untuk meningkatkan kualitas perempuan suku asli Papua di Kota Sorong, upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 2 tahap diantaranya memberikan pelatihan atau keterampilan dan Pemberian Motivasi.

²⁶ Petrus Ribo (53), ‘Wawancara’, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kamis 1-Juli-2021, Pukul 11:40 WIT.

2. Faktor pendukung Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Meningkatkan Kualitas Perempuan Suku Asli Papua Di Kota Sorong ialah dari kebijakan pemerintah yang mendukung peningkatan kualitas perempuan asli papua di Kota Sorong melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan anggaran dana. Sedangkan faktor penghambat ialah keterlambatan pencairan anggaran yang memperlambat program serta anggaran yang terbatas sehingga untuk memenuhi semua kegiatan yang direncanakan tidak semua terlaksana, malah ada yang tidak berjalan secara rutin dan kurangnya partisipasi masyarakat khususnya perempuan papua dalam mengikuti kegiatan pelatihan atau sosialisasi yang di berikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Pemerintah Daerah Kota Sorong untuk tidak memperlambat anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau memberikan anggaran dengan tepat waktu agar tidak memperlambat kinerja atau program-program yang telah direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta memberikan anggaran dengan jumlah yang besar supaya setiap program yang direncanakan dapat terealisasi dan berjalan sesuai yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Sorong, *Laporan Kinerja Pegawai (LAKIP) DPP & PA Kota Sorong* (Sorong, Papua Barat, 2020)

Efendi, Johnny Ibrahim, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum*, ke 3 (Jakarta: Kencana, 2020)

Fitrah, Luthfiyah, Muh, *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas Dan Studi Kasus)* (Sukabumi: CV Jejak, 2017)

Haque, Adzimar Tinur, Budi Setiawati, and Nuryanti Mustari, 'Pemberdayaan Perempuan Di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu', IV.1 (2015), 1–14

Kambuaya, Yermia Marthin, 'Pemberdayaan Perempuan Untuk Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Sorong Provinsi Papua Barat' (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2021)

Kompas tv Sorong, 'Bentuk Pola Pikir Perempuan Pelatihan Kepemimpinan', 30 Desember 2020, 2020 <<https://www.kompas.tv/article/134226/bentuk-pola-pikir-perempuan-pelatihan-kepemimpinan>>

Metro, 'Pola Pikir Perempuan Harus Berubah', *Radar Sorong*, 2021 <<https://www.radarsorongnews.com/pola-pikir-perempuan-papua-harus-berubah/>>

Siregar, Syofian, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2017)

Tv Sorong, Kompas, 'Isi Waktu Luang Warga Buat Sagu Jadi Kerupuk', *Kompas Tv*, 2020 <<https://www.kompas.tv/article/126496/isi-waktu-luang-warga-buat-sagu-jadi-kerupuk>>

Sanggar Maitemorai Pelatihan Kuliner Khas Papua', *Kompas Tv*, 2020 <<https://www.kompas.tv/article/132767/sanggar-maitemorai-pelatihan-kuliner-khas-papua>>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wasuway, Hendrina Johanna Sylvi, 2012 'Perempuan Maybrat Dan Dominasi Patriarki, Tesis' Universitas Indonesia, Jakarta.